

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I. Latar belakang**

Dunia saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19, selain menimbulkan dampak dari krisis kesehatan, juga menimbulkan dampak dari segi ekonomi dan sosial (Milani, 2021). Pandemi Covid-19 mengakibatkan resesi ekonomi secara global yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun bahkan mengalami pertumbuhan yang negatif (Gallant, et al , 2020). Kegiatan ekonomi mengalami kontraksi bahkan banyak perusahaan yang berhenti berproduksi (Goma, 2021). Negara-negara di seluruh dunia tengah memerangi coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. COVID-19 telah membuat ancaman yang bukan hanya ancaman terhadap sektor kesehatan setiap negara, namun juga mengancam sektor ekonomi (Zulkarnaen, W., et al. (2020 ).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan 2,41% karena dampak dari pandemi virus Covid-19 (Indayani & Hartono 2020). Selain mengakibatkan permasalahan ekonomi, pandemi ini juga mengakibatkan permasalahan sosial yang baru. Goma (2021) menjelaskan akan terjadi permasalahan yang baru seperti peningkatan pengangguran dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Selain itu, menurut Posel, et al (2021) kondisi kesehatan mental pekerja juga akan terganggu karena kehilangan pekerjaan dan terlalu lama menganggur. *The International Labour Organization* (ILO) atau yang sering disebut sebagai Organisasi Buruh Internasional memprediksi 305 juta orang akan kehilangan pekerjaan pada kuartal kedua tahun 2020. Pekerjaan yang hilang tersebut dampak dari pandemi virus corona yang sedang terjadi di

berbagai negara (ILO, 2020). Pandemi virus Covid- 19 menyebabkan peluang terjadinya pengangguran menjadi semakin tinggi (Gezici & Ozay, 2020). Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) per Agustus 2020 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau sebanyak 9,77 juta orang. Berdasarkan laporan tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan angka pengangguran sebanyak 7,1 juta selama 1 tahun. Memasuki tahun 2021, angka pengangguran semakin menurun meskipun tingkat penurunan hanya 0,81 persen saja.

Laporan BPS (2021) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2021 per Februari adalah 6,26%. Hasil tersebut turun sebesar 0,81% poin jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2020. Hasil survei BPS (BPS, 2020) menunjukkan selama masa pandemi Covid-19 terdapat 6 sektor usaha paling terdampak yaitu akomodasi, makanan atau minuman sebesar 92,47%, jasa-jasa lainnya sebesar 90,9%, sektor transportasi dan sektor pergudangan sebesar 90,34%, sektor konstruksi sebesar 87,94%, sektor industri pengolahan sebesar 85,98%, dan sektor perdagangan 84,6%. Survei dilakukan terhadap 34.559 ribu pelaku usaha pada kurun waktu 10 - 26 Juli 2020. Sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19 menyebabkan pengurangan pasokan tenaga kerja. Perusahaan, kantor, tempat usaha, dan kegiatan sektor industri dan hiburan harus mengurangi kapasitas pengunjung dan karyawannya guna mencegah penularan virus ini (European Commission, 2020). Sebagian pekerja kehilangan pekerjaan karena perusahaan menutup dan membatasi jumlah karyawan (Syahrial, 2020).

Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal menjadi alasan utama di balik krisis ini. Pertama, semakin banyak

populasi yang terinfeksi COVID-19 (termasuk populasi produktif). Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan. Terkait krisis ekonomi, salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -0,74% pada triwulan pertama 2021. Kondisi perekonomian pada triwulan pertama 2021 tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi meski menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2020.

Saat ini perekonomian Indonesia masih berada di bawah laju kondisi normal sebelum terjadi pandemi. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita (ukuran kesejahteraan rata-rata nasional) juga turun sebesar 3,15% pada 2020. Artinya, terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia selama 2020 dibandingkan 2019. Tingkat Kemiskinan nyaris tidak berubah Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai

keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Atas fakta itu, maka pemerintah yang diminta menyiapkan formulasi tepat, terutama menciptakan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran, Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)). Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah.

Tingkat pengangguran di Kota Ternate pada tahun 2018 mengalami penurunan cukup signifikan, sementara kemiskinan terjadi kenaikan di tahun yang sama. Selama rentang tahun 2017-2018 tingkat pengangguran terbuka di Kota Ternate mengalami penurunan dari 12,92% pada tahun 2017 menjadi 9,73% pada tahun 2018. Penurunan ini mengindikasikan sarapan tenaga kerja pada 2018 lebih tinggi dibanding tahun 2017, kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan.

Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan, adalah masalah pengangguran yang selama ini dihadapi dari sisi ekonomi. Pengangguran merupakan produk dari ketidak kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, oleh karena itu ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari pekerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sementara tingkat kemiskinan sangat menakutkan karena terjadi kenaikan. Dimana pada tahun 2017 sebesar 2,73% naik menjadi 3,00% per tahun 2018. Kenaikan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan meningkatnya garis kemiskinan yang semula Rp 514. 396, menjadi Rp 537. 524. Peningkatan garis kemiskinan dipengaruhi adanya inflasi atau peningkatan harga kebutuhan pokok. Hal ini juga kembali mempertegas bahwa peran penting pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok, sehingga menekan beban biaya hidup masyarakat. Walaupun terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di kota Ternate pada tahun 2018, Kota Ternate merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah ke-11 secara nasional dan terendah seluruh kabupaten kota provinsi Maluku Utara.

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 angka pengangguran di Ternate berada pada posisi 9%. Rata-rata pendapatan masyarakat Ternate, Dinas Tenaga Kerja juga mengatakan Kota Ternate berada di tataran *middle*. Artinya, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak rendah, tantangan kedepannya adalah pengurangan jumlah pengangguran akan semakin berat. Indonesia dalam beberapa tahun akan mengalami kondisi jumlah umur produktif

jauh lebih besar ketimbang penduduk usia tidak produktif, atau istilahnya bonus demografi.

Peneliti telah mendapatkan Data pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan Ekonomi 10 tahun terakhir, gambar dibawah ini menjelaskan presentase pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate.

Tabel 1.1 Perkembangan angka pengangguran, kemiskinan dan PDRB

<b>Tahun</b>	<b>Pengangguran (%)</b>	<b>Kemiskinan (%)</b>	<b>PDRB (%)</b>
2011	6,30	9,88	6,90
2012	7,36	7,95	7,53
2013	9,85	6,61	8,10
2014	9,79	6,61	8,81
2015	11,14	2,99	9,53
2016	11,14	2,67	10,29
2017	12,92	2,73	11,06
2018	9,73	3,00	11,98
2019	10,90	3,14	12,96
2020	10,87	3,46	12,84

*Sumber: BPS Kota Ternate*

Data di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Ternate mengalami penurunan dan terjadinya fluktuasi pada pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan Ekonomi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan Ekonomi, jika terjadi

peningkatan pengangguran dan kemiskinan maka akan berdampak negatif bagi pertumbuhan Ekonomi karena banyak masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan lebih sehingga terjadi penurunan dalam perputaran uang di Kota Ternate. Pemerintah sebenarnya telah melakukan kebijakan. Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran namun itu saja belum cukup. Persaingan usaha yang tidak berimbang dengan dominannya hypermarket yang dibangun berdekatan dengan pasar tradisional, atau hadirnya banyak minimarket di pelosok kota, membuat banyak pedagang pasar dan warung terengah-engah. Harga yang kalah murah, membuat para pedagang kecil tersebut harus banyak berharap pada pembeli yang memiliki kepedulian tinggi, pembeli yang lebih memilih pedagang kecil dari pada menambah kekayaan para pemodal super kaya.

Kota Ternate adalah Kota yang mempunyai populasi penduduk yang paling tinggi di Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate telah melakukan program *job fair* melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate untuk melatih dan mermbina masyarakat yang masih pengangguran atau belum mempunyai pekerjaan, banayak penduduk yang telah mendapatkan gelar Sarjana namun belum mendapatkan pekerjaan, lapangan kerja di Kota Ternate harus diciptakan karena setiap tahun penduduk yang mendpatkan gelar Sarjana terus meningkat. Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis ini tertarik dengan judul **“Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate 2011-2020”**.

## **I.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi ?
2. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi ?

3. Apakah pengangguran dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi ?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate 2011-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate 2011-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate 2011-2020.

### **I.4. Manfaat penelitian**

1. Bagi pihak pemerintah sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kota Ternate agar berdampak positif terhadap pertumbuhan Ekonomi
2. Bagi pihak peneliti, sebagai bahan referensi untuk mahasiswa atau masyarakat untuk melakukan penelitian selanjutnya.